

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada dasarnya pelayanan pada pemerintah yang baik terhadap rakyat di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki korelasi terhadap kinerja dan juga kredibilitas pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan juga pengambil kebijakan. Pemerintahan yang memiliki karakteristik desentralis dapat mendorong pelayanan yang maksimal kepada masyarakat setempat (masyarakat daerah). Setiap pemerintahan daerah memiliki peranan penting sehingga diharuskan untuk aktif berperan dalam meningkatkan potensi yang berada di wilayah tersebut<sup>1</sup>. Kerjasama dalam ruang lingkup dengan negara lain (Internasional) yang dilakukan oleh antar pemerintah daerah adalah perilaku dan juga kapasitas beserta kapabilitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak di luar negara yang dilakukan oleh *Sub-State Actor* atau pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kepentingan atau kebutuhan secara spesifik. Praktik kerjasama tersebut didasari oleh sistem desentralisasi yang bisa bergerak bebas yang dibatasi oleh kesepakatan antara pemerintah pusat dan daerah<sup>2</sup>.

Kerja sama internasional merupakan suatu wujud hubungan dalam suatu negara atau dengan negara lain dan bertujuan guna memenuhi kebutuhan atau

---

<sup>1</sup> Laode Muhamad Fathun, "Paradiplomasi Menuju Kota Dunia: Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar," *Indonesian Perspective* 1, no. 1 (2016): 1–90, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/10430>.

<sup>2</sup> Anggi Koenjaini Putri et al., "Relasi Pusat-Daerah Dalam Paradiplomasi Bermotif Nasionalistik: Studi Perbandingan Kasus Skotlandia Dan Papua," *Intermestic: Journal of International Studies* 7, no. 2 (2023): 390–769, <https://intermestic.unpad.ac.id/index.php/intermestic/article/view/328>.

mewujudkan tujuan tertentu. Kerjasama internasional tersebut meliputi kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan<sup>3</sup>. Kerjasama Internasional secara prakteknya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat atau pun dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain di luar negeri, tapi kerjasama internasional juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan kerjasama dengan organisasi internasional. Penelitian yang berjudul Kerjasama Non Governmental Organization Tentang program pemerintah untuk menurunkan angka perkawinan anak di Provinsi Mamuju yang menjadi penelitian dari Andi Nur Fiqhi Utam, dan Asma Amin menunjukkan kerja sama antara UNICEF bersama Pemerintah Kabupaten Mamuju memiliki peranan yang krusial dalam penanggulangan isu pernikahan usia anak. UNICEF memiliki kapasitas untuk memberikan bantuan teknis dan sumber daya guna merancang kegiatan yang berpengaruh positif dalam mengatasi permasalahan pernikahan usia anak. Pemerintah Kabupaten Mamuju harus secara aktif memprioritaskan isu pernikahan usia anak sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perancangan pembangunan daerah. Kerjasama antara lembaga internasional seperti UNICEF dan pemerintah daerah berpotensi untuk mencapai hasil yang lebih berpengaruh dalam usaha pencegahan pernikahan usia anak<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Annas Maulana Bagaskara and Shary Charlotte Pattipelohy, "Kerjasama Pemerintah Indonesia Dan ECPAT Dalam Menangani Permasalahan Child Trafficking Di Indonesia," *Journal of International Relation Diponegoro* 4, no. 3 (2018), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/21045/0>.

<sup>4</sup> Andi Nur Fiqhi Utami and Asma Amin, "Kerjasama NGO Pada Program Pemerintah Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Anak Di Kabupaten Mamuju," *Journal of Government and Politics (JGOP)* 5, no. 1 (2023): 69, <https://doi.org/10.31764/jgop.v5i1.16507>.

Praktik kerjasama internasional dengan organisasi internasional dibidang pendidikan adalah Penelitian yang berjudul Analisis kerjasama internasioal dalam Kerja Sama Pemerintah Daerah Tulungagung dan United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam Menangani Permasalahan Sosial Anak yang sekaligus menjadi penelitian dari Aziza More, dan Dyah Estu Kurniawati yang membuktikan bahwa kerjasama internasional antar daerah bisa dilakukan dengan organisasi internasional. Kerjasama internasional yang dilakukan dengan organisasi internasional juga sebagai usaha pemerintah daerah untuk bekerjasama dengan instutisi yang kompetensi dan keahliannya lebih fokus.

Penelitian ini menunjukkan bahwa langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung bersama UNICEF melibatkan beragam program, seperti dibangunnya ULT PSAI dan pengembangan inovasi KLA di wilayah tersebut. Program ini melibatkan upaya seperti penyediaan transportasi ekolah gratis, bantuan untuk penyelenggaraan pendidikan tanpa biaya, serta penerapan Program Gerak Gencar (Gerakan Desa Ramah Anak untuk Mewujudkan Generasi Cerdas) guna menaikkan presentase status Desa Layak Anak. Selain itu, Forum Anak digunakan sebagai platform untuk membangun Generasi Cerdas. Berikutnya, Program Sapa-SI Yatim diinisiasi sebagai tanggapan untuk memenuhi hak-hak anak yang kehilangan orang tua karena dampak dari pandemi Covid-19.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Aurora Aziza More & Dyah Estu Kurniawati, "Analisis Paradiplomasi Dalam Kerja Sama Pemerintah Daerah Tulungagung Dan United Nations Children's Fund (UNICEF) Dalam Menangani Permasalahan Sosial Anak," *SANG PENCERAH Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 8, no. 1 (2022): 407–20.

Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai berbagai permasalahan salah satunya di bidang pendidikan. Unicef Indonesia menyatakan bahwa sebanyak 4,1 juta anak di Indonesia tidak mendapatkan akses pendidikan. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2020 di Kabupaten Jember, terdapat 40 ribu anak yang tidak mengikuti pendidikan, termasuk yang telah putus sekolah atau belum pernah mendapatkan pendidikan sama sekali. Kota Jember menghadapi tantangan dalam sektor pendidikan. Menurut informasi yang disajikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember, sejak tahun 2021, tercatat ada 2.681 anak yang mengalami putus sekolah di bawah pengawasan Dinas Pendidikan Jember. Dari jumlah tersebut, sebanyak 596 anak putus sekolah di tingkat SD, dan 2.085 anak di tingkat SMP telah dilaporkan kepada DP3AKB Jember <sup>6</sup>. Padahal Jember dikenal sebagai Kota Pendidikan.

Terjadinya putus sekolah dapat disebabkan oleh faktor-faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal melibatkan kurangnya minat dan ketidakmampuan seorang anak untuk mengikuti proses pendidikan di sekolah <sup>7</sup>. Sementara itu, faktor eksternal melibatkan kendala ekonomi keluarga beserta tingkat kemiskinan, yang menyebabkan orang tua tidak dapat memberikan dukungan finansial untuk fasilitas pendidikan. Situasi ini menyebabkan anak-anak dari keluarga miskin menjadi kelompok yang paling terpengaruh dalam hal

---

<sup>6</sup> Safitri, "40 Ribu Anak Di Jember Putus Sekolah," radarjember.jawapos.com, 2023.

<sup>7</sup> Kurniawati, "Analisis Paradiplomasi Dalam Kerja Sama Pemerintah Daerah Tulungagung Dan United Nations Children's Fund (UNICEF) Dalam Menangani Permasalahan Sosial Anak."

pendidikan. Di Indonesia, 20% dari remaja berusia 15-19 tahun mengalami situasi putus sekolah, pengangguran, atau tidak mendapatkan pelatihan khusus, yang kemudian menjadi penyumbang utama tingginya tingkat pengangguran di negara ini. Keterbatasan dalam sistem pendidikan, kurangnya bimbingan karier, dan kekurangan fasilitas pembelajaran khusus menyebabkan Indonesia berada di peringkat kedua dalam tingkat pengangguran pemuda di kawasan Asia/Pasifik<sup>8</sup>.

Bersamaan dengan peningkatan pengungkapan pelanggaran hak anak dan dipengaruhi oleh dinamika hubungan internasional sekarang, peran tidak sekedar terbatas pada negara saja, melainkan juga melibatkan kontribusi atau peran dari pihak non-negara, seperti organisasi internasional. Maka dari itu, dalam penanganan kasus eksploitasi anak, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNICEF sebagai lembaga internasional. Dalam menjalankan tugasnya, UNICEF memprakarsai program-program khusus untuk Indonesia, yang diwujudkan melalui formulasi kebijakan, penyuluhan atau edukasi terkait isu-isu anak, serta memberikan dukungan dalam mengadvokasi pentingnya pendidikan dan program lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anak-anak Indonesia<sup>9</sup>.

Pemerintah Kabupaten Jember bersama United Nations Children's Fund (UNICEF) menjalin kerjasama dalam bentuk Pelatihan Perencanaan Pendidikan

---

<sup>8</sup> UNICEF, "Situasi Anak Di Indonesia –Tren, Peluang, Dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak," 2020.

<sup>9</sup> Triani Safira, Ardli Johan Kusuma, and Afrimadona Afrimadona, "Implementasi Kerja Sama Indonesia Dan UNICEF Dalam Mengatasi Eksploitasi Ekonomi Anak Di Indonesia Tahun 2017-2020 [Implementation of Indonesian and UNICEF Cooperation in Overcoming The Economic Exploitation of Childhood in Indonesia 2017-2020]," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 13, no. 2 (2023): 276–97, <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.2990>.

Berbasis Data, terutama dalam penyusunan Rencana Aksi Desa Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). Kolaborasi ini melibatkan Pemerintah Kabupaten Jember, UNICEF, dan Lembaga Pelatihan dan Konsultan Inovasi Pendidikan Indonesia (LPKIPI), yang melaksanakan sosialisasi dan pendataan ATS menggunakan aplikasi SIPBM atau DAPODIK di delapan desa sebagai proyek percontohan. Pemerintah Kabupaten Jember bekerja sama dengan UNICEF mengadakan sosialisasi Program Anak Putus Sekolah (ATS) dengan tujuan menurunkan angka putus sekolah dan mencegah anak-anak untuk tidak melanjutkan sekolah. Konsultan pendidikan UNICEF Jawa-Bali menyatakan bahwa program ATS difokuskan pada tiga aspek, yakni Anak Belum Pernah Sekolah (ABS), Anak Tidak Melanjutkan Sekolah (ATMS), dan Anak Putus Sekolah (APS) dalam rentang usia 7 hingga 18 tahun<sup>10</sup>.

Sejak UNICEF sepenuhnya fokus pada melakukan penelitian dan mengadvokasi hasil penelitian kepada berbagai pihak, pemangku kepentingan, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah, baik di tingkat nasional maupun lokal, permasalahan anak-anak yang tidak sekolah dalam mencapai pendidikan dasar untuk semua semakin mendapat perhatian lebih. Ini berarti bahwa sebelumnya, ketidakekolahan anak dianggap sebagai suatu peristiwa umum yang sering terjadi, tetapi dengan kehadiran UNICEF dan program kerjasamanya di Indonesia, permasalahan ini mulai mendapatkan perhatian yang memadai. Kolaborasi UNICEF dengan Indonesia melalui program SIPBM, PKBM, dan

---

<sup>10</sup> Sayuti, "Kolaborasi Pemkab Jember & UNICEF Tangani Anak Tidak Sekolah," [hariansuara.com](http://hariansuara.com), 2023.

Stranas ATS menunjukkan bahwa isu ATS memiliki urgensi yang perlu ditangani apabila pemerintah ingin mencapai empat tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yaitu mencapai pendidikan yang inklusif dan merata<sup>11</sup>.

UNICEF sebagai *intergovernmental organization* (IGO) yang mempunyai ciri dan nilai tata kelola antara aktor internasional dalam struktur kelembagaannya juga memiliki peran dalam pembentukan suatu jaringan kerja hubungan transgovernmental dengan berbagai pihak lain dalam konteks hubungan internasional yang modern. Dalam perspektif kerjasama internasional, penting untuk memperhatikan kepentingan daerah dalam setiap langkah yang diambil oleh pihak-pihak subnasional. Kegiatan kerjasama internasional melibatkan berbagai aktivitas dari aktor subnasional bersama dengan pihak asing. Strategi penanganan kondisi suatu daerah menjadi isu di tingkat transnasional<sup>12</sup>.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti mengambil rumusan masalah penelitian yaitu “Bagaimana Implementasi Kerjasama Internasional Antara Pemerintah Indonesia dengan UNICEF dalam mengasati Masalah Pemerataan Pendidikan di Kabupaten Jember?”

---

<sup>11</sup> Atikha Sari, “IMPLEMENTASI KERJASAMA UNICEF DAN INDONESIA DALAM STRATEGI NASIONAL PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH (STRANAS ATS) (STUDI KASUS: NAGARI TARUANG-TARUANG TAHUN 2020-2021),” *JOM FISIP* 10, no. 2 (2023): 1–15.

<sup>12</sup> Ignatius Hubert and Windy Dermawan, “West Jakarta Government’s Paradiplomacy towards Global Public in Kalideres Refugee Issues,” *Society* 8, no. 2 (2020): 567–80, <https://doi.org/10.33019/society.v8i2.218>.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya membantu dan memberikan dukungan terhadap penyediaan informasi dan pengetahuan, serta bisa menambah pandangan studi Hubungan Internasional dengan menjabarkan Upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah pemerataan Pendidikan Kabupaten Jember melalui kerjasama internasional dengan UNICEF.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

##### **1.3.2.1 Manfaat Praktis**

Melalui penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan secara tidak langsung menjadi lebih memahami kerjasama internasional Pemerintah Indonesia dengan UNICEF dalam Upaya menangani masalah pemerataan Pendidikan di Kabupaten Jember.

### 1.3.2.2 Manfaat Akademis

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk pengetahuan dan sudut pandang baru terhadap semua orang serta mampu dijadikan sebagai tinjauan pustaka bagi para akademisi yang akan datang. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan referensi dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional terkait dengan teori yang digunakan, dalam hal ini menggunakan teori Kerjasama internasional. Teori ini digunakan penulis untuk menjelaskan kerjasama antara Pemerintah Jember dengan UNICEF untuk mengatasi pemerataan Pendidikan di Kabupaten Jember.

#### 1.4 Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dibuat untuk melihat posisi penelitian ini dalam cakupan yang sama dengan penelitian sebelumnya. Penelitian Terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan bahan acuan dari penelitian lain dengan penelitian ini. Untuk terhindari dari kesamaan terhadap penelitian lain, maka dalam penelitian terdahulu ini mencantumkan hasil - hasil penelitian terdahulu.

**Penelitian Pertama** adalah penelitian dari **Muhammad Arman Ali Hasan** yang berjudul **Praktek Paradiplomasi Pemerintahan Kabupaten Jember di Bidang Ekonomi, Pendidikan dan Pariwisata**.<sup>13</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang melihat fenomena yang terjadi yang dihubungkan dengan perspektif paradiplomasi.

---

<sup>13</sup> Muhammad Arman Ali Hasa, "Praktek Paradiplomasi Pemerintahan Kabupaten Jember Di Bidang Ekonomi, Pendidikan Dan Pariwisata" (Yogyakarta, 2022), [https://www.researchgate.net/publication/366594721\\_Praktek\\_Paradiplomasi\\_Pemerintahan\\_Kabupaten\\_Jember\\_di\\_Bidang\\_Ekonomi\\_Pendidikan\\_dan\\_Pariwisata](https://www.researchgate.net/publication/366594721_Praktek_Paradiplomasi_Pemerintahan_Kabupaten_Jember_di_Bidang_Ekonomi_Pendidikan_dan_Pariwisata).

Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan Pemerintahan Kabupaten Jember di Indonesia telah melakukan global paradiplomasi di bidang ekonomi, pendidikan, dan pariwisata. Misalnya, pemerintah daerah telah melakukan kerjasama dengan menerapkan konsep sister city dengan kota thesaloniki di Yunani untuk mewujudkan daerah go international. Sama halnya juga dengan bekerjasama dengan Negara Belgia, telah bekerjasama untuk menarik investasi asing, dan meningkatkan mutu UMKM yang ada di Kabupaten Jember. menjalin kemitraan Pendidikan dengan institusi di negara lain, atau mempromosikan daerah tersebut sebagai tujuan wisata.

Berdasarkan penjelasan diatas maka pada penelitian ini berfokus melihat kerjasama terhadap tiga bidang yang berbeda. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis fokus terhadap bidang pendidikan yang menjadi langkah pemerintah Jember untuk mengatasi masalah Anak Tidak Sekolah (ATS)

**Penelitian Kedua** adalah penelitian dari **Aurora Aziza More, dan Dyah Estu Kurniawati** yang berjudul **Analisis Paradiplomasi dalam Kerja Sama Pemerintah Daerah Tulungagung dan United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam Menangani Permasalahan Sosial Anak.**<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data wawancara dan data dari pemerintah terkait yang menjadi sumber primer dan studi Pustaka sebagai sumber sekunder.

Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa program kerjasama oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung bersama UNICEF membuktikan bahwa presentase permasalahan anak turun drastis. Hal tersebut adalah wujud dari Upaya

---

<sup>14</sup> Kurniawati, "Analisis Paradiplomasi Dalam Kerja Sama Pemerintah Daerah Tulungagung Dan United Nations Children's Fund (UNICEF) Dalam Menangani Permasalahan Sosial Anak."

pencegahan dari kerjasama kedua belah pihak dalam menciptakan program seperti bantuan penyelenggaraan pendidikan gratis. Skema kerjasama paradiplomasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam skema paradiplomasi bersama UNICEF dapat menghasilkan dampak yang baik dalam penanganan isu sosial anak di Kabupaten Tulungagung

Pada penelitian di atas memiliki tempat penelitian di Kabupaten Tulungagung sebagai tempat terjadinya kerjasama dengan UNICEF yang berfokus kota ramah anak. Perbedaan penelitian yang penulis teliti adalah pada tempat penelitian di Jember dengan memiliki fokus terhadap mengatasi masalah ATS (Anak Tidak Sekolah)

**Penelitian Ketiga** adalah penelitian dari **Nabila Thifalya, Nadira Putri kowari, Saraswati Widuri, dan Sahadi Humaedi** yang berjudul **PERAN UNICEF DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA**.<sup>15</sup> Penelitian ini melihat fenomena peranan organisasi internasional UNICEF sebagai organisasi internasional yang bertujuan khusus untuk menangani isu anak-anak dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yang dijelaskan secara yang di peroleh data menggunakan library research

Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan UNICEF merupakan inisiatif PBB yang bekerja sebagai organisasi untuk mendukung permasalahan anak. UNICEF memiliki pedoman untuk tidak pernah menelantarkan anak-anak yang berada dalam krisis akibat segala macam konflik, kelaparan, atau keadaan darurat yang lain. UNICEF diwajibkan untuk mampu membuat dorongan untuk pemerintah

---

<sup>15</sup> Nabila Thifallya Regina et al., "PERAN UNICEF DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA ROLE OF UNICEF IN CHILDREN'S PROTECTION IN INDONESIA," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 3 (2022): 117–24, <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/download/40376/pdf>.

Indonesia guna memperkuat kerangka hukum dan peraturan di setiap daerah agar sejalan dengan hukum nasional dan memberikan sanksi yang lebih keras sehingga oknum yang tidak bertanggung jawab dapat merasa jera. Selain itu, pemerintah harus membantu membangun kapasitas jaringan para profesional dan pekerja sosial di seluruh daerah dan sub daerah sehingga mereka dibekali dengan keterampilan untuk menyadarkan masyarakat dan keluarga tentang pentingnya hak-hak anak.

Berdasarkan uraian penelitian diatas, penelitian ini melihat atas organisasi internasional yang berfokus ke Anak-Anak (UNICEF). Penelitian ini melihat peranan UNICEF yang bisa memberikan dampak dan pengaruh kepada berbagai pihak untuk bekerjasama terkait masalah anak di berbagai negara di dunia.

**Penelitian Keempat** adalah penelitian dari **Astri Maulida** yang berjudul **Paradiplomasi kota Bandung (Indonesia) – Braunscheig (Jerman) Dalam Kerangka Sister City**.<sup>16</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dengan memperoleh data menggunakan library research.

Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Paradiplomasi Kota Bandung (Indonesia) - Kota Braunschweig (Jerman), yang merupakan bagian dari kerangka sister city yang dipimpin oleh Pemerintah Kota Bandung, berfungsi sebagai jembatan antara pengembangan potensi masyarakat kota dengan aktivitas pemerintah kota di dunia internasional. Kota Bandung telah menjadi kota kembar sejak tahun 1960. Kerjasama ini juga merupakan kota kembar tertua di Indonesia. Kesenambungan kerja sama kedua kota selama ini dilakukan melalui tahapan pelaksanaan kerja sama kota kembar yaitu evaluasi, penandatanganan

---

<sup>16</sup> Astri Maulida, “PARADIPLOMASI KOTA BANDUNG (INDONESIA) - BRAUNSCHWEIG (JERMAN) DALAM KERANGKA SISTER CITY” (Unversitas AL\_GHIFARI, 2019), <http://repository.unfari.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/527/skripsi.pdf?sequence=1>.

Memorandum of Understanding (MoU), penyusunan rencana kerja sama, persetujuan DPRD, permohonan promosi oleh pemerintah, dan persiapan rencana kerjasama datang. Draf MoU (Memorandum of Understanding). kesepakatan), penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding), pelaksanaan kerjasama, evaluasi pelaksanaan kerjasama, dan pelaporan pelaksanaan.

Penelitian diatas melihat kerjasama melalui mekanisme Sister City antara Bandung dan Braunschweig. Penelitian tersebut juga melihat historis dan tahapan formal dari pertemuan hingga pelaksanaan. Pada penelitian memiliki perbedaan mencolok dari tempat penelitian yaitu Jember. Selain itu penelitian ini fokus kepada usaha mengatasi masalah pendidikan melalui mekanisme Kerjasama Internasional anatar Jember dan UNICEF.

**Penelitian Kelima** adalah penelitian dari Rismanto Pamungkas Salim yang memiliki judul **PARADIPLOMASI KOTA MORELAND DAN HUME, AUSTRALIA MELALUI KESEPAKATAN PERSAHABATAN DENGAN DISTRIK AILEU, TIMOR LESTE 2000 - 2015.**<sup>17</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan deskriptif kualitatif dengan data diperoleh dan dianalisis menggunakan library research.

Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan konsep pelebagaan paradiplomasi oleh Alexander Kuznetsov dan sampai pada kesimpulan bahwa berbagai aktivitas paradiplomasi di kota Moreland dan Hume dilakukan melalui berbagai aktivitas. Langkah-langkah tersebut adalah pembentukan FACC sebagai lembaga diplomatik regional, lembaga yang

---

<sup>17</sup> Rismanto Pamungkas Salim, "PARADIPLOMASI KOTA MORELAND DAN HUME, AUSTRALIA MELALUI KESEPAKATAN PERSAHABATAN DENGAN DISTRIK AILEU, TIMOR LESTE 2000 - 2015" (Universitas Brawijaya, 2018), [https://repository.ub.ac.id/id/eprint/163478/1/Rismanto\\_Pamungkas\\_Salim.pdf](https://repository.ub.ac.id/id/eprint/163478/1/Rismanto_Pamungkas_Salim.pdf).

mempertemukan kepentingan masyarakat, organisasi regional dan pemerintah dalam perumusan dan pelaksanaan berbagai kegiatan persahabatan kegiatan di daerah Ailleu.

Penelitian diatas lebih menitik beratkan akan adanya kerjasama yang terjadi untuk menyelesaikan masalah yang sama sama terjadi antara kedua belah pihak. Penelitian ini juga melihat permasalahan yang terjadi di timor leste. Letak pembeda dari penelitian yang penulis teliti adalah melihat fenomena yang terjadi hanya di satu pihak yaitu Jember sebagai daerah yang mempunyai pemertaan pendidikan dengan mekanime kerjsama internasional dengan UNICEF sebagai organisasi internaisonal yang bertujuan khusus dalam mensejahterahkan anak anak di seluruh dunia.

**Penelitian Keenam** adalah penelitian dari Sindriani Akase, Caecilia J.J Waha, dan Natalia Lengkong yang berjudul **Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Organisasi Internasional dalam Penanganan Pengungsi di Indonesia Menurut Hukum Internasionnal**.<sup>18</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan deskritif kualitatif dengan data diperoleh dan dianalisis menggunakan library research.

Hasil penelitian diatas adalah adanya kerjasama internasional yang dilakukan Pemeirntah Indonesia dengan Internasional bertujuan untuk mengatasi masalah pengungsi. Organasi tersebut adalah UNHCR dan IOM yang menjadi *partner* kerjasama pemerintah Indonesia. Kedua organisasi tersebut melakukan

---

<sup>18</sup> Sindriani Akase, Caecilia J.J Waha, and Natalia Lengkong, "KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA DAN ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM PENANGANAN PENGUNGGSI DI INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL," *Lex Privatum* 12, no. 3 (2023), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/52430>.

kegiatan advokasi dan juga teknis berupa memberikan bantuan kepada pengungsi yang membutuhkan.

Penelitian di atas melihat kerjasama internasional antara Pemerintah Indonesia dengan UNHCR dan IOM dalam mengatasi masalah pengungsi yang terjadi di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan perspektif hukum dalam membantu menjelaskan kepentingan Indonesia memiliki kerjasama internasional dengan UNHCR dan IOM. Letak pembeda pada penelitian ini melihat dari sisi hak asasi manusia berupa Pendidikan. Letak persamaan pada penelitian ini melihat perspektif kerjasama internasional Pemerintah Indonesia dengan organisasi internasional.

**Penelitian Ketujuh** adalah penelitian dari Reisy Faradila Putri yang berjudul **Kerjasama Keimigrasian Indonesia dengan Organisasi Internasional Untuk Pengungsi**.<sup>19</sup> Penelitian ini memakai metode penelitian deskriptif dengan deskriptif kualitatif dengan data diperoleh dan dianalisa menggunakan library research.

Hasil penelitian ini bisa disimpulkan Kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan UNHCR untuk menangani pengungsi pada saat terjadinya krisis kemanusiaan timor leste. Kerjasama tersebut di distribusikan ke instansi Imigrasi sebagai Lembaga yang memiliki tanggung jawab dan peraan teknis dalam permasalahan pengungsi. Penelitian ini menggunakan perspektif konvensi jenuwa 1967 sebagai alasan mengapa hal ini perlu dan penting dalam kerjasama Indonesia dan UNHCR

---

<sup>19</sup> Reisy Faradila Putri, "KERJASAMA KEIMIGRASIAN INDONESIA DENGAN ORGANISASI INTERNASIONAL UNTUK PENGUNGSI," *Journal of Administration and International Development* 1, no. 2 (2021), <https://journal.poltekim.ac.id/jaid/article/view/291>.

Penelitian diatas melakukan kerjasama internasional berdasarkan mendesaknya keadaan dan menggunakan perspektif huukum internasional sebagai landasan pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan UNHCR. Letak kesamaan pada penelitian ini adalah dengan adanya distribusi kekuasaan kepada Imigrasi Indonesia sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab dan memiliki fungsi teknis dalam permasalahan pengungsi.

**Tabel 1.1 Posisi Penelitian**

No	Nama Peneliti dan Judul	Jenis penelitian dan alat Analisa	Hasil
1	<p>“Praktek Paradiplomasi Pemerintahan Kabupaten Jember di Bidang Ekonomi, Pendidikan dan Pariwisata”</p> <p>Oleh: Muhammad Arman Ali Hasan</p>	<p>Jeni Penelitian: Deskriptif</p> <p>Alat Analisa: Konsep dan Fenomena</p>	<p>Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan Pemerintahan Kabupaten Jember di Indonesia telah melakukan global paradiplomasi di bidang ekonomi, pendidikan, dan pariwisata. Misalnya, pemerintah daerah telah melakukan kerjasama dengan menerapkan konsep suster city dengan kota thesaloniki di Yunani untuk mewujudkan daerah go international. Sama halnya juga dengan bekerjasama dengan Negara Belgia, telah bekerjasama untuk menarik investasi asing, dan meningkatkan mutu UMKM yang ada di Kabupaten Jember. menjalin kemitraan Pendidikan dengan institusi di negara lain, atau mempromosikan daerah tersebut sebagai tujuan wisata.</p>
2	<p>“Analisis Paradiplomasi dalam Kerja Sama Pemerintah Daerah Tulungagung dan United Nations</p>	<p>Jeni Penelitian: Deskriptif</p> <p>Alat Analisa: Konsep dan Fenomena</p>	<p>Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa program kerjasama oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung bersama UNICEF membuktikan bahwa presentase permasalahan anak turun drastis. Hal tersebut</p>

	<p>Children's Fund (UNICEF) dalam Menangani Permasalahan Sosial Anak”</p> <p>Oleh: Aurora Aziza More, Dyah Estu Kurniawati</p>		<p>adalah wujud dari Upaya pencegahan dari kerjasama kedua belah pihak dalam menciptakan program seperti bantuan penyelenggaraan pendidikan gratis. Skema kerjasama paradiplomasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam skema paradiplomasi bersama UNICEF dapat menghasilkan dampak yang baik dalam penanganan isu sosial anak di Kabupaten Tulungagung</p>
3	<p>“PERAN UNICEF DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA.”</p> <p>Oleh: Nabila Thifallya, Nadira Putri, Saraswati Widuri, dan Sahadi Humaedi</p>	<p>Jeni Penelitian: Deskriptif Kualitatif Alat Analisa: Konsep dan Fenomena</p>	<p>Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan UNICEF merupakan inisiatif PBB yang bekerja sebagai organisasi untuk mendukung permasalahan anak. UNICEF memiliki pedoman untuk tidak pernah menelantarkan anak-anak yang berada dalam krisis akibat segala macam konflik, kelaparan, atau keadaan darurat yang lain. UNICEF diwajibkan untuk mampu membuat dorongan untuk pemerintah Indonesia guna memperkuat kerangka hukum dan peraturan di setiap daerah agar sejalan dengan hukum nasional dan memberikan sanksi yang lebih keras sehingga oknum yang tidak bertanggung jawab dapat merasa jera. Selain itu, pemerintah harus membantu membangun kapasitas jaringan para profesional dan pekerja sosial di seluruh daerah dan sub daerah sehingga mereka dibekali dengan keterampilan untuk menyadarkan masyarakat dan keluarga tentang pentingnya hak-hak anak.</p>
4	<p>“Paradiplomasi kota Bandung (Indonesia) – Braunscheig</p>	<p>Jeni Penelitian: Deskriptif Alat Analisa: <i>National Interst</i></p>	<p>Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Paradiplomasi Kota Bandung (Indonesia) - Kota</p>

	<p>(Jerman) Dalam Kerangka Sister City”</p> <p>Oleh: Astri Maulida</p>		<p>Braunschweig (Jerman), yang merupakan bagian dari kerangka sister city yang dipimpin oleh Pemerintah Kota Bandung, berfungsi sebagai jembatan antara pengembangan potensi masyarakat kota dengan aktivitas pemerintah kota di dunia internasional. Kota Bandung telah menjadi kota kembar sejak tahun 1960. Kerjasama ini juga merupakan kota kembar tertua di Indonesia. Kesenambungan kerja sama kedua kota selama ini dilakukan melalui tahapan pelaksanaan kerja sama kota kembar yaitu evaluasi, penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), penyusunan rencana kerja sama, persetujuan DPRD, permohonan promosi oleh pemerintah, dan persiapan rencana kerjasama datang. Draf MoU (Memorandum of Understanding). kesepakatan), penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding), pelaksanaan kerjasama, evaluasi pelaksanaan kerjasama, dan pelaporan pelaksanaan.</p>
5	<p>“PARADIPLOMASI KOTA MORELAND DAN HUME, AUSTRALIA MELALUI KESEPAKATAN PERSAHABATAN DENGAN DISTRIK AILEU, TIMOR LESTE 2000 - 2015.”</p> <p>Oleh: Rismanto Pamungkas Saliim</p>	<p>Jeni Penelitian: Deskriptif  Alat Analisa: <i>National Interest</i></p>	<p>Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan konsep pelebagaan paradiplomasi oleh Alexander Kuznetsov dan sampai pada kesimpulan bahwa berbagai aktivitas paradiplomasi di kota Moreland dan Hume dilakukan melalui berbagai aktivitas. Langkah-langkah tersebut adalah pembentukan FACC sebagai lembaga diplomatik regional, lembaga yang mempertemukan kepentingan masyarakat, organisasi regional dan pemerintah dalam perumusan</p>

			dan pelaksanaan berbagai kegiatan persahabatan kegiatan di daerah Ailleu.
6	<p>“Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Organisasi Internasional dalam Penanganan Pengungsi di Indonesia Menurut Hukum Internasionnal”</p> <p>Oleh Sindriani Akase, Caecilia J.J Waha, dan Natalia Lengkong</p>	<p>Jeni Penelitian: Deskriptif</p> <p>Alat Analisa: <i>International Cooperation</i></p>	<p>Hasil penelitian diatas adalah adanya kerjasama internasional yang dilakukan Pemeirntah Indonesia dengan Internasional bertujuan untuk mengatasi masalah pengungsi. Organisasi tersebut adalah UNHCR dan IOM yang menjadi <i>partner</i> kerjasama pemerintah Indonesia. Kedua organisasi tersebut melakukan kegiatan advokasi dan juga teknis berupa memberikan bantuan kepada pengungsi yang membutuhkan.</p>
7	<p>“Kerjasama Keimigrasian Indonesia dengan Organisasi Internasional Untuk Pengungsi”</p> <p>Oleh Reisya Faradila Putri</p>	<p>Jeni Penelitian: Deskriptif</p> <p>Alat Analisa: <i>National Interest</i></p>	<p>Hasil penelitian ini bisa disimpulkan Kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan UNHCR untuk menangani pengungsi pada saat terjadinya krisis kemanusiaan timor leste. Kerjasama tersebut di distribusikan ke instansi Imigrasi sebagai Lembaga yang memiliki tanggung jawab dan peraan teknis dalam permasalahan pengungsi. Penelitian ini menggunakan perspektif konvensi jenewa 1967 sebagai alasan mengapa hal ini perlu dan penting dalam kerjasama Indonesia dan UNHCR</p>

## 1.5 Landasan Teori dan Konsep

### 1.5.1 Kerjasama Internasional

Kerjasama Internasional terbentuk karena adanya kehidupan internasional yang terbentuk secara alami di berbagai spektrum seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, lingkungan hidup, pertahanan, atau berbagai masalah yang terjadi sehingga mendorong negara-negara di dunia membentuk suatu hubungan kerjasama internasional. Kerjasama terbentuk karena di setiap negara di dunia mempunyai tujuan. Adanya hal tersebut melahirkan rumusan kebijakan yang juga menyangkut kepentingan negara tersebut. Kepentingan nasional tersebut yang mendorong negara untuk merumuskan kebijakan salah satunya kerjasama internasional<sup>20</sup>.

Kerjasama dapat terjadi sebagai dari bagian akibat akan penyesuaian perilaku aktor sebagai respon atau antisipasi terhadap preferensi aktor lain. Kerjasama bisa terjadi melalui mekanisme negosiasi proses tawar menawar yang sifatnya eksplisit atau diam diam. Kerjasama internasional bisa di definisikan sebagai serangkaian hubungan yang tidak didasarkan pada paksaan atau pun kepatuhan yang dilegitimasi oleh anggota yang di dalam organisasi internasional<sup>21</sup>.

Dalam pembahasan teorisasi kerjasama internasional mencakup hubungan antara dua negara atau hubungan antar unit yang lebih besar yang biasa dikenal dengan multilateralisme. John Gerard Ruggie berpendapat bahwa multilateralisme

---

<sup>20</sup> Era Riana, "KERJASAMA INDONESIA-KOREA SELATAN DALAM Mendukung PROGRAM ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP) DI INDONESIA 2013-2015," *JOM FISIP* 3, no. 1 (2016), <https://media.neliti.com/media/publications/33054-ID-kerjasama-indonesia-korea-selatan-dalam-mendukung-program-one-village-one-produc.pdf>.

<sup>21</sup> James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff jr, *Contending Theories of International Relations (A Comprehensive Survey)*, Fift Editi (New York: Addison Wesley Longman, Inc., 2001), <https://www.scribd.com/document/492082821/Contending-Theories-of-International-Relations-a-Comprehensive-Survey-PDFDrive>.

bisa didefinisikan sebagai suatu bentuk lembaga yang mampu untuk mengkoordinasikan hubungan antara tiga negara atau lebih yang mencakup juga organisasi internasional, rezim international, dan institusi yang sesuai pembahasan di lingkup internasional atau sesuai dengan *International Order*<sup>22</sup>.

Kerjasama Internasional tidak hanya terbatas terjadi karena adanya dua negara yang saling berhubungan untuk melakukan kerjasama. Tetapi terlebih daripada itu kerjasama internasional tidak hanya terjadi antar individu, tetapi juga antar entitas kolektif, perusahaan, partai politik, organisasi internasional, kelompok teroris, dan negara. Kerjasama Internasional juga melibatkan organisasi internasional antar pemerintah (IGO), organisasi internasional non pemerintahan (NGO). Adanya aktor yang beragam tersebut diharapkan untuk mampu bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Salah satu kerjasama internasional yang melibatkan organisasi internasional antar pemerintah (IGO) adalah bekerjasama dengan negara negara lain dengan memerangi masalah lingkungan. Selain organisasi antar pemerintah, organisasi internasional non pemerintah (NGO) juga bekerjasama yang salah satunya adalah dengan kampanye menyelamatkan ikan paus, memperjuangkan HAM, atau juga dengan memperjuangkan pendidikan<sup>23</sup>.

Pada penelitian ini kerjasama internasional berfungsi untuk menjelaskan kerjasama yang terjadi antara negara dan organisasi internasional dalam hal ini yang melakukan kerjasama internasional adalah Pemerintah Indonesia dengan UNICEF. Kerjasama internasional juga digunakan melihat implementasi yang terjadi atas kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak.

---

<sup>22</sup> Ibid, Hlm 507

<sup>23</sup> Xinyuan Dai, Snidal Duncan, and Michael Sampson, "International Cooperation Theory and International Institutions," 2017, <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.93>.

### 1.5.2 Organisasi Internasional

Organisasi Internasional adalah konsep liberalisme yang berpandangan bahwa hakikat manusia adalah baik dan memiliki kepercayaan adanya perdamaian yang abadi yang bisa terwujud melalui cara kerjasama. Organisasi internasional berpendapat bahwa masalah yang terjadi di dunia Internasional bisa diatasi melalui kerjasama dan juga mendirikan organisasi internasional. Keohane dan Young mendefinisikan, organisasi internasional adalah muatan perjanjian yang sifatnya eksplisit, dinegosiasikan diantara aktor internasional, dan juga memiliki perilaku otoritas yang bersifat, memberikan rekomendasi, atau penerapan larangan dan juga batasan atas suatu isu atau fenomena tertentu.<sup>24</sup>

Organisasi internasional antar pemerintah adalah organisasi yang terdiri dari berbagai negara atau wilayah yang didirikan atas dasar perjanjian yang terdiri lebih dari 2 negara. Negara anggota tersebut yang menentukan jalan dan cara dalam berorganisasi dan menyediakan pendanaan.<sup>25</sup> Organisasi internasional muncul dalam berbagai fungsi dan juga peran. Peran-peran tersebut yaitu *three major roles can be identified: those of instrument, arena, and actor*. Secara *general* terdapat tiga peranan organisasi internasional diantaranya yaitu sebagai instrumen dalam mencapai sebuah kepentingan atau tujuan nasional, arena sebagai diplomasi, dan aktor independen yang dapat mengatur.<sup>26</sup>

#### 1. Organisasi Internasional sebagai instrumen

Organisasi Internasional sebagai Instrumen yaitu instrumen terkait kebijakan dari pemerintah yang digunakan dalam diplomasi negara dalam

---

<sup>24</sup> Citra M.A Hennida, *Rezim Dan Organisasi Internasional Interaksi Negara, Kedaulatan, Dan Institusi Multilateral* (Malang: Intrans Publilshing, 2015).

<sup>25</sup> Shazelina Z. Abidin, "International Organisations," 2016, <https://www.e-ir.info/2016/12/30/international-organisations/>.

<sup>26</sup> Clive Archer, *International Organization Third Edition*, First Edit (New York: Routledge, 2001).

mencapai suatu kesepakatan, menghindari dan mengurangi eskalasi segala konflik yang sedang terjadi. Organisasi Internasional sebagai instrumen menjadikan organisasi internasional sebagai alat penyambung dari kepentingan nasional suatu negara.

## 2. Organisasi internasional sebagai arena

Organisasi Internasional sebagai arena adalah organisasi internasional memiliki peran sebagai media terjadinya kegiatan atau forum himpunan dan konsultasi, serta merancang dan memprakarsai dari suatu pembentukan perjanjian Internasional. Arena tersebut adalah tempat suatu negara untuk mengemukakan pandangannya.

## 3. Organisasi internasional sebagai aktor

Organisasi internasional sebagai aktor adalah organisasi internasional menjadi satu aktor independen yang bisa bertindak sendiri tanpa adanya pengaruh atau kekuatan dari luar. Archer berpendapat bahwa banyak dari organisasi internasional pemerintahan / International Government Organization (IGO) sangat bergantung terhadap keanggotaan negara. Sedangkan, Organisasi Internasional Non Pemerintahan / International Non-Governmental Organization (INGO) memiliki kekuatan dalam identitasnya

Organisasi Internasional pada penelitian ini digunakan untuk menjelaskan peran organisasi internasional yaitu United Nation Children's Fund (UNICEF) dalam implementasi kerjasama UNICEF dengan Jember dalam mengatasi masalah pemerataan pendidikan terkhusus kasus Anak Tidak Sekolah (ATS)

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif memberikan kajian yang terperinci terhadap situasi bersifat khusus atau hubungan

sosial. Penelitian deskriptif juga digunakan dalam menemukan suatu pengetahuan yang luas terhadap objek pada masa tertentu.<sup>27</sup> Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya dengan menginterpretasi objek sesuai dengan keadaan pada saat itu dengan keadaan, peristiwa dan segala variabel meskipun dengan angka atau kata – kata. Menurut Schegel (1996) penelitian deskriptif banyak dipakai orang yang sedang melakukan penelitian sosial dengan menemukan gambaran keadaan yang memang sangat mudah dikerjakan dengan berbagai cara seperti mengenal apa yang akan di teliti dengan dengan perhatian yang serius dan usaha, kecerdasan, sehingga siapa saja dapat mendeskripsikan dengan tepat dan mendetail. Sehingga penggunaan metode deskriptif berguna untuk menjelaskan mengenai

### **1.6.2 Metode Analisa**

Penelitian ini menggunakan teknik Analisa data kualitatif, dimana metode kualitatif cocok digunakan khususnya pada permasalahan yang masih penuh dengan teka teki. Peneliti ingin memahami suatu keadaan sosial yang sangat kompleks dan penuh arti. Selain itu metode kualitatif bisa digunakan dalam merekonstruksi fenomena sosial yang rumit.<sup>28</sup> Untuk membantu analisa dalam penulisan, akan mengumpulkan data – data pendukung yang akan digunakan dalam menjelaskan paradiplomasi yang dilakukan Pemerintah Jember dalam kerjasama dengan UNICEF sebagai usaha menangani masalah anak tidak sekolah (ATS) di Jember.

---

<sup>27</sup> Cut Medika Zellatifanny and Bambang Mudjiyanto, “Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi,” *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi* 1, no. 2 (2018): 83–90, [https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20.\(10/10/2021\)](https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20.(10/10/2021))

<sup>28</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 2013.

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu pengumpulan data Primer dan juga didukung dengan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diambil melalui proses wawancara mendalam dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, LSM LPKIPI sebagai jembatan antara kerja sama tersebut, dan data sekunder dari literature atau karya ilmiah yang sudah ada. Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Jember yang menjadi unit analisis adalah:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Jember).
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB Jember).

Sedangkan dari pihak LSM yaitu dari Lembaga Pelatihan dan Konsultan Inovasi Pendidikan Indoneisa (LPKIPI Jember) sebagai media terealisasinya kerja sama tersebut. Hal tersebut dijadikan data primer dalam penelitian ini. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti (dari tangan pertama). Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.<sup>29</sup>

Penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka atau metode kepustakaan sebagai data sekunder. Metode pengumpulan data adalah seperangkat metode pengumpulan data yang mengumpulkan data dari buku, laporan, majalah, e-book, makalah penelitian, dan berita online yang berkaitan dengan topik penelitian, serta membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> LMS SPADA INDONESIA, "Data Dan Sumber Data Kualitatif," Kemendikbud, n.d., [https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/553988/mod\\_folder/content/0/Data dan Sumber Data Kualitatif.pdf](https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/553988/mod_folder/content/0/Data%20dan%20Sumber%20Data%20Kualitatif.pdf).

<sup>30</sup> Asmendri Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* 6, no. 1 (2020).

## 1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

### 1.6.4.1 Batasan Materi

Batasan materi pada penelitian ini diperlukan agar penelitian ini tidak melebar, maka penelitian ini menetapkan batasan dengan fokus penelitian pada Kerjasama Internasional Pemerintah Jember dengan UNICEF pada bidang Pendidikan yang fokus menangani masalah Anak Tidak Sekolah (ATS).

### 1.6.4.1 Batasan Waktu

Batasan waktu yang digunakan dalam penelitian ini berkisar pada tahun 2022 hingga 2023. Tahun tersebut dipilih karena kerjasama yang terjadi antara Jember dan UNICEF sebagai usaha mengatasi masalah Anak Tidak Sekolah (ATS), terjadi pada tahun 2022 hingga 2023.

## 1.7 Argumen Pokok

Pemerintah Jember adalah pemerintah daerah di Jawa Timur yang mempunyai masalah juga yang sama seperti pemerintah daerah lain. Masalah tersebut meliputi Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Pendidikan. Masalah tersebut masing masing daerah mempunyai cara yang berbeda beda. Mulai dari membuat kebijakan yang pro terhadap sosial, ekonomi atau melalui peta jalan yang lain seperti yang dilakukan pemerintah Jember dalam menangani masalah Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui peta jalan Kerjasama Internasional dengan UNICEF.

Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Jember dan UNICEF dalam memberantas anak tidak sekolah (ATS) di Jember merupakan salah satu praktik Kerjasama Internasional di bidang Pendidikan yang sedang berlangsung di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa konsep Kerjasama Internasional tidak hanya fokus pada aktor sub-state atau pemerintah

daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri saja, namun Lembaga pemerintah ataupun Lembaga non-pemerintah juga mampu untuk mendalangi kerja sama tersebut. Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (Stranas ATS) yang merupakan kolaborasi dari UNICEF dan Pemerintah Indonesia menjadi acuan dari kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dan UNICEF. Kerja sama ini memiliki tujuan dalam memastikan penguatan, perbaikan, perluasan, dan koordinasi yang lebih efektif dari berbagai program dan inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan pendidikan dan pelatihan anak-anak Indonesia.

### 1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memahami penelitian ini dengan mudah, penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab, diantaranya adalah sebagai berikut:

Judul	Pembahasan
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> 1.1. Latar Belakang 1.2. Rumusan Masalah 1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian 1.4. Penelitian Terdahulu 1.5. Teori/Konsep 1.5.1 Teori Kerjasama Internasional 1.6. Metode Penelitian 1.6.1. Jenis Penelitian

	<p>1.6.2. Metode Analisa</p> <p>1.6.3. Teknik Pengumpulan Data</p> <p>1.6.4. Ruang Lingkup Penelitian</p> <p>1.7. Argumen Pokok</p> <p>1.8. Sistematika Penulisan</p>
<b>BAB II</b>	<p><b>Pemerataan Pendidikan</b></p> <p>2.1 Pendidikan Indonesia</p> <p>2.2 Kondisi Pendidikan di Jember</p> <p>2.3 Kerjasama Pendidikan Anak di Indonesia Bersama UNICEF</p>
<b>BAB III</b>	<p><b>Kerjasama Indonesia dan UNICEF di Bidang Pendidikan</b></p> <p>3.1 Peran UNICEF Dalam Masalah Pendidikan di Indonesia</p> <p>3.2 Implementasi Kerjasama dalam Pemerataan Akses Pendidikan di Jember oleh UNICEF</p>
<b>BAB IV</b>	<p><b>PENUTUP</b></p> <p>4.1 Kesimpulan</p> <p>4.2 Saran</p>